



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN
SUB UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNDORO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
3. NHK : **179095**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.131.000.000**

1. Tanah Seluas 828 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 621.000.000
2. Tanah Seluas 1120 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
3. Tanah Seluas 615 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
5. Tanah Seluas 2195 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 275.500.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TAFT JEEP Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1979, WARISAN Rp. 1.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
6. MOBIL, SUZUKI KATANA JEPP Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp.



35.000.000

7. MOBIL, TOYOTA HARTOP JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp.

140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.182.946.877
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.589.446.877
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.589.446.877

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 April 2020**.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.